

## OLIGARKI DALAM DEMOKRASI INDONESIA

oleh: Intan Rachmina Koho, S.IP., M.Si  
Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNPRI

### Abstrak

Oligarki adalah merupakan sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit). Sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainya. Sistem ini disebut juga pemerintahan dari atas yakni Negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya tidak dapat (sulit). Tulisan ini menggambarkan bagaimana politik oligarki terjadi dalam partai politik di Indonesia.

Kata kunci: oligarki, partai politik

### *Abstract*

*Oligarchy is a political system in which the governing party consists of a number of people or a group of people [elite group]. In running the government, an elite group always uses all means so that the people can be controlled and controlled. This system is also called government from above, namely the State is used as a tool to achieve the goals of the elite, so that goals related to people's welfare, justice and individual independence are usually not [difficult]. This paper describes how the political oligarchy occurs in political parties in Indonesia.*

*Keywords: oligarchy, political party*

## I. PENDAHULUAN

Tulisan ini akan dimulai dengan mengenal Siklus Polybius, yaitu siklus bentuk pemerintahan dikembangkan oleh filsuf yang bernama Polybius, sejalan dengan pendapat Aristoteles, Polybius berpendapat bahwa pemerintahan Negara umumnya diawali dengan bentuk MONARKI, dimana seorang raja/ratu memerintah sebagai penguasa tunggal demi kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian bentuk pemerintahan semacam ini lama kelamaan akan merosot menjadi TIRANI ketika raja yang bersangkutan atau raja-raja keturunannya, tidak lagi memikirkan kepentingan umum. Dalam situasi semacam itu umumnya akan muncul sekelompok bangsawan yang kemudian menggerakkan perlawanan hingga akhirnya dapat mengambil alih kekuasaan. Saat inilah pemerintahan tersebut disebut ARISTOKRASI. Namun karena kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan, pemerintahan kaum bangsawan yang baik itu pun lama-lama akan merosot dan menjadi pemerintahan kaum bangsawan yang baik itu pun lama-lama akan merosot dan menjadi pemerintahan yang akan mementingkan diri sendiri hingga akhirnya disebut sebagai OLIGARKI yang menindas rakyat. Akhirnya rakyat lah yang akan memberontak dan menjalankan pemerintah sampai akhirnya pemerintahan berganti menjadi DEMOKRASI namun lama kelamaan pemerintahan ini juga akan jatuh akibat korupsi dan lain-lain hingga pemerintahan menjadi OKLOKRASI ditengah semua itu Polybius meramal akan ada orang yang kuat dan berani untuk mengambil alih pemerintahan dan menjadi seorang raja sehingga pemerintahan kembali menjadi pemerintahan MONARKI.

Setelah melihat siklus Polybius, kemudian tulisan ini akan difokuskan pada bentuk pemerintahan oligarki dalam demokrasi Indonesia, maka akan dimulai dengan pertanyaan apa itu Oligarki? Oligarki adalah kekuasaan yang dikendalikan oleh sedikit orang, tetapi memiliki pengaruh dominan dalam pemerintahan. *Oligarki* merupakan tipe klasik suatu bentuk kekuasaan. Kata oligarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oligoi* berarti “beberapa” atau “segelintir” dan *archo* berarti “memerintah”. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang, namun untuk kepentingan beberapa orang tersebut (bentuk negatif). Hampir senada dengan itu, menurut **Aristoteles**, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompoknya.

Banyak studi membuktikan bahwa sejak awal terjadi pembajakan terhadap lembaga-lembaga dan prosedur Demokrasi, dan ini menjadikan demokratisasi Indonesia berwatak sangat elitis. Robison & Hadiz (2004) melakukan studi yang menggaris-bawahi bahwa elit predatorial (elit pemangsa rakyat) lama yang berbasis partai-partai politik menguasai panggung politik. Mereka melakukan reorganisasi kekuasaan mengikuti logika politik kartel, yaitu Politik kartel digambarkan sebagai situasi manakala partai-partai politik secara bersama-sama mengabaikan komitmen ideologis dan programnya agar tetap bisa bertahan di lingkaran kekuasaan dengan memilih bergabung dengan pemerintahan baru pasca pemilu. Sebagai imbalan atas dukungan yang diberikan mereka berbagi pos-pos jabatan di pemerintahan. Politik kartel pada gilirannya membentuk pemerintahan berwatak oligarkis. Oligarki merupakan mekanisme pemusatan kekuasaan pada segelintir elit berkuasa yang menekankan pada kekuatan sumber daya material (kekayaan) sebagai basis mempertahankan

kekuasaan sekaligus kekayaan pada diri elit. Sementara plutokrasi mirip dengan oligarki. Namun, plutokrasi terjadi tatkala tercipta suatu kondisi ekstrem ketimpangan sumber daya antara “kaya” dan “miskin” di dalam suatu negara. Plutokrat (penguasa dalam plutokrasi) tidak hanya menguasai sumber ekonomi dan politik, melainkan juga sumber daya kekerasan (pasukan, senjata, teknologi). dan ini menjadi basis bagi munculnya oligarki. tapi ada studi lain yang dilakukan Hee-Yeon Cho (2008) melihat bahwa “demokrasi oligarkis” Indonesia berangsur-angsur berubah menjadi “oligarki demokratis.” Inilah sejenis oligarki yang ingin mempertahankan kekayaan—sekaligus merebut kekuasaan—melalui kompetisi electoral (melalui pemilu) yang berwatak elitis. Sehingga, bukan politik demokrasi yang berlangsung di Indonesia, tapi politik oligarki. Sementara itu Winters (2014) juga menegaskan kenyataan serupa, bahwa elemen penting neo Orde Baru adalah kaum oligark (elit berwatak oligarkis) yang tak ikut lenyap bersama tumbangannya Suharto. Kaum oligark yang dulu berada di bawah kendali mutlak Suharto kini sedang berebut posisi di puncak kekuasaan. Oligark sultanistik dizaman Orde Baru terpusat di Cendana, sedangkan oligark pasca Orde Baru menyebar ke dalam banyak kutub persaingan kaum elit. Metode otoritarian Orde Baru membuat oligarki bisa dikuasai seorang diktator, sedangkan “demokratisasi” pasca Orde Baru membuat para oligark bersaing melalui mekanisme kompetisi electoral. Sehingga Winters ingin menegaskan bahwa oligarki dan demokrasi saling menunggangi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka masalah yang akan dibahas adalah mengapa muncul oligarki dan bagaimana oligarki muncul di Indonesia?

## II. PEMBAHASAN

Menurut Mahfud MD (Rol(8/2/2014): Dari oligarki melahirkan transaksi, transaksi melahirkan oligarki, Politik oligarki merupakan sistem politik yang membuat pengambilan keputusan-keputusan penting dikuasai oleh sekelompok elit penguasa partai politik, karena jabatan pimpinan partai politik menjadi rebutan banyak pihak. Banyak orang berebut untuk bisa menduduki jabatan pimpinan partai politik dan tidak sedikit yang menggunakan uang untuk meraihnya.

Menurut Firman Noo, Kepala Puslit Politik LIPI, ada beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi terjebak oligarki dan menjadi akar bagi terciptanya oligarki, termasuk di Indonesia. Salah satu institusi yang turut berperan adalah partai politik.

Pertanyaan yang kemudian kerap mengusik adalah bagaimana sebuah institusi demokrasi seperti partai bisa terjebak dalam lingkaran oligarki? Di Indonesia keterjebakan itu disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain,

*Pertama*, Ketua Umum sebagai figur utama atau elite partai yang menjadi penentu,

"Orang-orang kuat" ini muncul sebagai representasi ideologis atau historis. Di Indonesia saat ini, pada umumnya partai tidak bersifat ideologis, maka figuritas di kebanyakan partai disebabkan karena faktor sejarah terbentuknya partai atau sebuah "moment historis" yang menyebabkan seorang figur menjadi mencuat ke permukaan dan mendapat dukungan luas. Figur-figur memainkan

peran kesejarahan partai itu menyebabkan penghormatan, yang akhirnya kerap berlebihan sehingga keberadaannya berikut *inner circle* di dalamnya sangat kokoh. Partai-partai yang sejak awal diinisiasi, dibentuk, dan dijalankan oleh tokoh penentu, yang biasanya kemudian sebagai pimpinan partai, cenderung berpotensi mengalami oligarkis. Keberadaan figur ini, di satu sisi mampu menghadirkan stabilitas partai. Namun, di sisi lain juga berpotensi besar menghadirkan model pengaturan dan tata kelola partai yang sentralistik.

*Kedua*, aspek historis ataupun ideologis, kehadiran para figur penentu yang melahirkan oligarki juga disebabkan adanya ketergantungan finansial partai pada sumber-sumber keuangan dimiliki figur. Colin Crouch (2004) menggunakan istilah "firma politik" untuk menggambarkan ketergantungan finansial dan merembet pada struktur pembentukan partai yang pada akhirnya bagaimana partai dikelola. Situasi ini diperkuat oleh kondisi pragmatisme semakin kental saat ini karena *money talks* yang menyebabkan figur-figur kuat secara finansial akan bisa berperan amat besar. Dulu almarhum Cak Nur pernah menyinggung faktor ini dengan istilah kepemilikan "gizi". Situasi ini sangat terasa terutama pada partai-partai yang tidak berorientasi *values* atau ideologi dalam aktivitasnya. Akibatnya, jaringan (*networking*), konstelasi, ataupun kontestasi internal yang terbentuk saat ini lebih dipengaruhi oleh faktor kekuatan material-finansial.

*Ketiga*, pelembagaan partai yang belum sempurna. Pelembagaan partai itu

sendiri singkatnya adalah sebuah kondisi ketika sistem yang dibangun partai dan segenap aturan main dihargai serta dijalankan secara konsisten selain terbangunnya pola sikap dan budaya dalam partai.

Namun, yang terjadi saat ini pelembagaan masih berjalan stagnan bahkan mengalami regresi. Sistem dan aturan kerap ditafsirkan untuk kemudian disesuaikan demi kepentingan elite dan jaringan oligarkinya. Dalam momen-momen tertentu, pelaksanaan musyawarah menjadi semu. Keputusan partai kerap diambil sepihak. Sementara hukuman bagi mereka yang membangkang atau dianggap tidak loyal bisa diputuskan secara cepat, tanpa harus melalui tahapan-tahapan pemeriksaan. Turunan dari lemahnya kelembagaan adalah proses kaderisasi yang mati suri. Pada akhirnya memungkinkan "figur-figur asing" untuk bisa langsung berada dalam lingkaran kekuasaan, yang kiprahnya kebanyakan cenderung mengokohkan oligarki. Ketidakjelasan kaderisasi juga menyebabkan kader lebih terpicu untuk berlindung pada patron tertentu sehingga memuluskan pola hubungan *patron-client*, tentu saja mengganggu pembangunan demokrasi internal partai yang sehat.

*Keempat*, AD/ART partai juga memberikan landasan bagi penguatan peran elite. Studi mengenai kandidasi partai, menunjukkan dalam banyak hal, termasuk kandidasi, figur pimpinan partai menjadi demikian berkuasa, dan pada beberapa partai menjadi demikian absolut, karena aturan main internal memberi celah untuk itu. Kondisi ini tentu mendorong

perluasan rekayasa penciptaan kepatuhan buta yang objektif.

*Kelima*, faktor eksternal turut memengaruhi aturan main terkait kepartaian dan kepemiluan yang secara umum masih memberikan celah bagi partai-partai untuk membangun oligarki dalam dirinya. Setidaknya hingga kini keharusan kaderisasi, pengelolaan keuangan partai yang mampu menetralisasi peran oligarki belum diatur secara tegas dan komprehensif. Selain itu, syarat ambang batas presiden maupun pencalonan kepala daerah yang memberikan peluang elite partai untuk saling bermanuver membangun koalisi juga turut berkontribusi secara tidak langsung bagi pengokohan kekuasaan elite maupun ketergantungan kader pada manuver elite. selain itu yang turut memberikan kenyamanan para oligarki adalah sikap kurang kritis masyarakat atau *civil society* pada kondisi internal partai-partai. Akibatnya, partai tidak merasa terusik apalagi terpicu memperbaiki diri agar bisa benar-benar menjadi lembaga demokrasi yang mampu bersikap dan berperilaku demokratis.

Mengingat kompleksitas penyebab oligarki di atas, diperlukan pendekatan komprehensif mulai dari pembenahan internal partai, pengaderan partai yang reformer, dukungan aturan dukungan *civil society*. Pembenahan yang bersifat parsial dan tanpa dukungan komprehensif, jelas tidak akan membawa dampak signifikan bagi upaya pereduksian oligarki dalam partai politik.

Kemudian menjawab pertanyaan ke dua yaitu bagaimana oligarki muncul di Indonesia?

Jeffrey A. Winters dalam bukunya bertajuk *Oligarchy* menempatkan oligarki dalam dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Dimensi kedua, oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik.

Menurut Winters, sistem oligarki pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1970 yang dibangun oleh Soeharto. Untuk memimpin sistem oligarki yang dibentuknya, Soeharto berlagak layaknya seorang The Godfather yang membagi-bagi kekayaan alam Indonesia pada kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok para jenderal, penguasa etnis Tionghoa dan kelompok pribumi.

*"Setelah berkuasa, ancaman nyata Soeharto itu ada pada para Jenderal TNI, jadinya dia membagi-bagikan kekayaan misalnya dengan pengelolaan hutan di Kalimantan dan menyebut para Jenderal itu kaya karena dia. Soeharto itu seorang Godfather yang ekonomis dan politis. Sistem oligarki Soeharto mulai mengalami gangguan saat anak-anak Soeharto menjadi dewasa dan mulai berbisnis. Kejatuhan Soeharto pada tahun 1998, karena para oligark di bawah Soeharto sudah tidak mau membela Soeharto karena tingkah laku anak-anaknya sudah tidak bisa dikendalikan, contohnya ketika LB*

*Moerdani mengeluhkan anak-anak Soeharto dan akhirnya dia dipecat,"*

Pada saat ini di Indonesia, kekuatan oligark dikuasai oleh kalangan pribumi, karena mereka memiliki uang dan jabatan. Tetapi sebelumnya, di zaman Orde Baru, oligark dikuasai oleh pengusaha dari etnis Tionghoa, yang punya akses langsung ke Soeharto.

Berbeda dengan era orde lama dan orde baru, pada masa reformasi ini bentuk demokrasi berubah sejak pemilu tahun 1999. Hadirnya oligarki ini dimulai dari keberlangsungan sistem politik yang dipilih. Dalam sistem demokrasi tidak langsung seperti yang diterapkan di Indonesia, dalam skema penyelenggaraan pemilu didahului dengan pemilu legislatif, partai politik merupakan elemen penting. Partai politik memiliki peran strategis sekaligus vital, yakni menjadi pihak yang diberikan kepercayaan politik oleh rakyat melalui mekanisme keterwakilan di parlemen/DPR. Dengan melihat pada alur yang linier, partai politik tepat berada di tengah antara warganegara sebagai konstituen dengan negara sebagai pelaksana tertinggi pemerintahan. Dengan menggunakan mekanisme keterwakilan menuntut adanya individu-individu yang duduk di kursi parlemen/DPR. Partai politik, menjadi satu-satunya institusi yang berwenang melakukan rekrutmen menjangkau wakil-wakil tersebut. Tugas ini pula yang kemudian mensyaratkan partai politik melakukan kaderisasi politik; menjangkau individu-individu terbaik yang representatif untuk duduk di kursi parlemen/DPR.

Jika melihat realitas yang menggejala dalam tubuh partai-partai politik di Indonesia, tampak betul bahwa oligarki seperti dalam tafsiran Winters merupakan penyakit yang sudah akut. Hampir semua partai di Indonesia sebenarnya dikuasai oleh segelintir elite yang memiliki -dalam istilah Pierre Bourdieu- modal kapital dan sosial yang kuat.

Gurita oligarki dalam partai politik menguatkan asumsi bahwa partai politik gagal dalam melakukan fungsinya sebagai agregator demokratisasi. Fungsi rekrutmen dan kaderisasi yang macet dan partai politik lebih suka menggelar karpet merah kepada pemburu kekuasaan bermodal uang miliaran rupiah. Pendidikan politik yang disajikan di masyarakat diringkas ke dalam materi-materi kampanye-kampanye yang gegap gempita, gaduh oleh berita bohong, menjatuhkan lawan dengan fitnah atau hoax dan sama sekali tidak mencerahkan. Bahkan pada titik yang paling parah, partai politik menjadikan masyarakat sebagai konstituennya dianggap sebagai obyek politik semata lima tahunan yaitu mendekati rakyat ketika membutuhkan suara rakyat dalam pemilu.

Sebagai subyek demokrasi, seharusnya masyarakat dituntut mendapatkan pendidikan politik dan memiliki pengetahuan politik. Tanpa pengetahuan politik, demokrasi hanya akan berjalan secara prosedural dan lupa pada esensinya. Namun dalam kenyataannya, praktik ideal partai politik tersebut lebih sering tidak terlaksana. Secara internal, partai politik bahkan kerap kali gagal mempraktikkan

mekanisme demokrasi dan terjebak dalam budaya oligarki. Dalam konteks politik nasional, hal itu tampak jelas dalam mekanisme penjurangan calon anggota legislatif maupun kepala daerah oleh sejumlah partai. Tampak jelas bahwa seleksi calon legislatif dan kepala daerah justru dilakukan dengan cara-cara yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Sistem penjurangan cenderung tertutup, tidak transparan, dan tidak memungkinkan dipantau oleh publik. Belum lagi soal fenomena mahar politik yang selalu mengiringi proses penjurangan calon pemimpin daerah.

Di tangan para elite itulah segala keputusan partai politik ditentukan melalui mekanisme hirarki yang kaku, alias dari atas ke bawah. Seorang ketua partai beserta orang-orang di lingkaran terdekatnya merupakan sosok-sosok superior yang memegang kewenangan penuh dalam ihwal *decision making*, termasuk menentukan siapa yang bakal diusung dalam pileg dan pilkada.

Menjadi tidak mengherankan manakala dalam konteks usung-mengusung calon kepala daerah partai politik cenderung mengistimewakan figur-figur yang dinilai memiliki modal kapital. Acapkali figur itu bukan kader partai dan terbilang tidak memiliki basis pendukung yang berafiliasi dengan parpol tertentu. Keputusan partai untuk mengusung calon kepala daerah dari jalur non-kader ini tidak jarang menimbulkan polemik di kalangan internal partai. Kader partai yang telah berjuang dari bawah dan potensial tentu merasa ditelungkar karier politiknya.

Partai politik begitu kuat perannya dalam Negara, sehingga layak dikategorikan sebagai monopolistik. Setelah lebih dari dua dekade, ternyata penguatan peran secara cepat (mendadak) yang tanpa dilandasi pendewasaan secara memadai itu, mengkondisikan partai menjadi rentan oleh jebakan hakekat kekuasaan berupa kecenderungan untuk membesar dan memusat. Maka tidaklah mengherankan, apabila dewasa ini semakin dikenali penguatan watak sistem kekuasaan oligarki dan bahkan aristokrasi di dalam partai politik

Sistem kekuasaan oligarki partai politik tampil melalui kecenderungan sentralisasi kekuasaan, dominasi elit partai, pragmatism berlebihan {opportunistic} dan kronisme kepemimpinan {pengurus, yang secara keseluruhan dibungkus dengan pemandulan pelembagaan {institusionalisasi} partai. Dalam pada ini, gejala aristokratisasi partai terlihat dari kronilisasime elit atau penguasa partai yang mulai tergeser oleh nepotisme dan dinasti.

Sejalan dengan pergeseran sistem kekuasaan itu, maka kebebasan rakyat yang terfokus kepada mobilisasi, sementara mereka dieksploitasi oleh pemimpin partai yang berkuasa secara oligarki, mulai terancam kehilangan kebebasan dan kemungkinan dieksploitasi secara intensif oleh pengurus partai yang menghidupkan sistem kekuasaan aristokrat. Sementara sistem aristokrat bangkit dalam partai, akan tetapi kontroversi sengitnya dengan sistem kekuasaan demokratik, memberi

keleluasaan kepada pendukung kekuasaan oligarki untuk berkorporasi terus. Kondisi itu dapat dipahami karena kekuatan sosial dan ekonomi kaum aristokrat belum sempat dikembangkan.

Pada saat parlemen/DPR yang sedang dikuasai Partai Politik secara monopolistic dengan menafikan peran ormas dan perseorangan melalui peraturan perundangan yang dibuatnya, dipertanyakan kinerja dan fungsinya, karena tidak berhasil menyelesaikan masalah masyarakat dan bangsa serta Negara, apalagi memajukan kehidupannya, maka amatlah beralasan untuk memahami peran sistem kekuasaan oligarki yang dipergunakan partai dalam menyelenggarakan tugas-tugas parlemen/DPR dalam rangka mencari solusinya. Upaya pemahaman dimaksudkan menjadi mendesak, tatkala kepercayaan publik kepada parlemen/DPR begitu buruknya sebagaimana ditemukan oleh para peneliti, dan pada saat institusi perwakilan rakyat itu terperosok ke dalam penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana diindikasikan oleh korupsi sejumlah anggotanya. Dengan begitu, siapapun akan bertanya tentang peran sistem kekuasaan oligarki yang dipraktikkan para politisi partai, tatkala mereka menyelenggarakan kekuasaan DPR. Jawaban atas pertanyaan itu, diungkap melalui kinerja sejumlah aspek utama kehidupan DPR, yaitu perwakilan politik, tatanan kekuasaan lembaga itu, kinerja DPR, dan produk utamanya, dibawah pengaruh unsur oligarki sistem kekuasaan partai yang relevan.

Konservatisme Partai dan Perwakilan Politik DPR yaitu Prinsip demokrasi universal mengajarkan bahwa anggota DPR sebagai wakil rakyat, bertindak atas nama dan untuk rakyat. Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Dalam lima tahun pertama sejak persiapan Pemilu 1999 sampai amandemen UUD 1945 dirampungkan, kaum reformator berupaya menguatkan DPR dan mengoperasikan perwakilan politik rakyat secara tepat. DPR dibuka secara fisik dan fungsional untuk mewakili rakyat.

Pada Pemilu 2004, konservatisme mulai bergeser, partai menentukan calon dan kemenangan Pemilu dengan menggunakan nomor urut calon. Elit partai memberlakukan kembali hak recall atas anggotanya yang dinilai indisipliner, lebih dari itu politisi partai yang menguasai DPR kehilangan kepekaan atas keluhan dan kritik serta tuntutan rakyat. Semua itu menggambarkan konservatisme politisi partai penguasa parlemen/DPR, bukan saja karena mengembalikan watak parlemen/DPR Orba, melainkan melemahkan dan membendung trasisi demokrasi di parlemen/ DPR.

Sesungguhnya kontra reformasi parlemen/DPR seperti itu mengukuhkan pengoperasian sistem perwakilan politik wali yang menjauhkannya dari rakyat bersama kepentingannya, karena menghindarkan praktek sistem perwakilan utusan (delegate). Dengan begitu, maka politisi partai di parlemen/ DPR menjadi beralasan untuk bersikap tidak responsif terhadap rakyat, atau bersikap “anjing menggonggong kapilah berlalu” yang memaksakan kehendak dengan



mengabaikan aspirasi dan kritik masyarakat, sembari memberi penjelasan asal bunyi “asbun”

Meskipun prinsip demokrasi perwakilan membiasakan equality antar anggota parlemen/DPR karena persamaan prosedur yang ditempuh untuk menjadi anggota dan persamaan kedudukan sebagai wakil rakyat, namun dalam praktek semua persamaan itu dikalahkan oleh dominasi fraksi sebagai ujung tombak partai di parleme/DPR. Tak satupun struktur dan kultural serta proses parlemen/DPR sebagai intitusi dan sistem kekuasaan dalam Negara yang bisa dikontrol fraksi. Fraksi telah menjelma sebagai pemusat kekuasaan dalam DPR. Maka fraksi besar atau gabungan fraksi, menjadi penentu dalam DPR. Persetujuan fraksi menentukan agenda dan proses kinerja serta keputusan DPR dan unit fungsionalnya. Fraksi mengendalikan dan mengontrol anggota parlemen/DPR dengan alasan indiscipliner, atas nama dan persetujuan pimpinan partainya.

Kekuasaan fraksi sebagai perpanjangan tangan partai di parlemen/DPR semakin terpusatkan, karena kroniisme melandasi struktur fraksi sebagai kelompok anggota parlemen/DPR secara politis. Pemusatan kekuasaan itu, diperkuat dengan kewenangan fraksi untuk meminta atau memotong penghasilan anggotanya sebesar 25 sampai 40 persen, yang pada gilirannya dialokasikan fraksi untuk membiayai kinerja fraksi dan pengurus partai.

Kekuasaan fraksi merasuki institusi dan kinerja parlemen atau DPR, melalui

badan kelengkapan, mulai dari komisi dan panitia ad-hok sampai komisi tetap [anggaran dan BURT} dan pimpinan. Fraksi menentukan proses dan maksud (sasaran dan tujuan) kinerja alat keleengkapan dimaksudkan, karena fraksi bertanggungjawab kepada partai, bukan kepada konstituennya, maka kepentingan partai dan fraksi serta anggotanya dijadikan pijakan oleh fraksi untuk memproses kinerja parlemen/DPR. Perjuangan kepentingan yang diatas namakan fraksi itu lah yang dijadikan jalur penyaluran oligarki sistem kekuasaan partai ke dalam sistem kekuasaan parlemen/DPR sebagai komponen Negara.

Memang prinsip demokrasi perwakilan bukan hanya memperlakukan parlemen/DPR sebagai institusi Negara yang bertindak atas nama dan sekaligus untuk rakyat. Eksekutif dan Yudikatif di bidang tugasnya masing-masing bersikap yang sama yaitu wakil rakyat. Hanya saja, wakil rakyat di lembaga legislatif bertugas menetapkan kebijaksanaan publik sebagai kerangka kerja Negara untuk menanggulangi masalah masyarakat dan bangsa serta Negara, sambil memajukannya, karena Eksekutif dan Yudikatif sebagai wakil rakyat sekaligus melaksanakan dan menjaganya dari penyelewengan, maka kinerja parlemen/DPR menjadi dasar penentu keberhasilan Negara mengatasi masalah rakyat dan memajukan kehidupannya.

Setidaknya ada tiga simpul kinerja parlemen/DPR untuk menghasilkan kebijaksanaan publik, yaitu inisiatif dan pembahasan RUU, lobby dan pembuat keputusan politik. Efektifitas kinerja itu

dalam artian ketepatan proses dan hasilnya, amat ditentukan oleh kadar pelembagaan DPR. Dan karena DPR didominasi Partai Politik, maka tingkat pelembagaan partailah sebagai penentu sebagai penentu sesungguhnya bagi pelembagaan DPR.

Sejatinya UUD 1945 hasil amandemen, memastikan bahwa kekuasaan legislasi berada ditangan DPR. Hanya saja sikap itu tidak didukung dengan prinsip trias politika, sehingga UUD sendiri mengatur bahwa UU dibuat oleh DPR bersama Presiden. Konsekuensinya adalah kegamangan DPR untuk menghasilkan UU insiatifnya, dan gotong royong DPR bersama Presiden untuk membahas dan memutuskan RUU menjadi UU.

Kegagalan pelembagaan kekuasaan legislasi DPR itu, erat kaitannya dengan mandulnya pelembagaan partai dan sistem politik di dalam kerangka Sistem Pemerintahan Presidensial. Sejauh ini arah dan upaya pelembagaan partai dan sistem partai, selalu dalam kerangka Sistem Pemerintahan Parlemonter atau Semi Presidensial. Karena personafikasi partai dan sistem partai berkembang terus dengan akibat mandulnya pelembagaan partai dan sistem partai. Sewaktu pemimpin (elit) partai-partai mendominasi DPR. Maka penonjolan tokoh anggota melumpuhkan insttusi DPR, karena secara riil penampilan tokoh fraksi dari partai-partai. Mendominasi kinerja dewan, berlangsung diluar misinya untuk melayani rakyat melainkan di dalam kerangka kepentingan anggota bersaman fraksi dan fraksi.

Maka tidak mengherankan apabila berbagai lobby yang berlangsung antar fraksi ataupun antara DPR dengan Presiden, bukannya berpola argumentative melainkan bergaya dagang daging sapi dan bahkan konspirasi (persengkongkolan) politik yang didasarkan kepada kepentingan sempit dan jangka pendek. Tidaklah aneh, bila lobby merupakan institusi politik DPR, yang mewadahi dan membesarkan serta menyuburkan lahirnya para politisi oportunistis dan ular kepala dua. Akibatnya lobby bukan berfungsi untuk menyuburkan demokrasi, melainkan mengukuhkan oligarki dan aristokrasi.

Mandulnya pelembagaan DPR sebagai produk dari kegagalan partai melembagakan dirinya, berakibat pula kepada mekanisme atau tatacara pembuatan keputusan politik. Voting sebagai teknik pembuatan keputusan politik utama dalam demokrasi tersingkirkan untuk digantikan dengan musyawarah untuk mufakat. Pergeseran itu sejalan dengan penggunaan teknik dagang sapi sebagai alih alih dari argumentasi rasional dan factual. Semua itu berakar kepada pengutamaan kepentingan tokoh politik di DPR, ketimbang penerimaan atas aturan main adil sebagai pembimbing kinerja DPR.

Perlu diingatkan bahwa musyawarah dan mufakat sebagai teknik pembuatan keputusan politik, tidaklah pas dengan demokrasi karena melumpuhkan antara kompetisi dan tanggung jawab individu anggota DPR, musyawarah dan mufakat bukan saja merupakan teknik yang lazim dalam sistem otoriter orla dan orba, melainkan juga dilandasi oleh paradigam

bernegara kolektif, yang sudah terbukti gagal secara universal, seharusnya amandemen UUD 1945 sudah menggandeng paradigm bernegara kolektif (dalam pembukaan) dengan individual (dalam pasal-pasal HAM), tetapi amandemen itu tidak memberi pedoman tentang prioritas pilihan diantaranya dan tentang penyelesaian konflik yang berakar kepada masing-masingnya. Ketidakpastian paradigm itu, memberi peluang kepada kaum konservatif untuk meneruskan penggunaan teknik musyawarah untuk mufakat bagi pembuatan keputusan politik.

Partai dan sistem partai elitis dibalik kebijaksanaan publik, dalam demokrasi partai dibentuk oleh rakyat untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingannya di dalam kehidupan bernegara. Ideologi populis tentang fungsi partai itu berubah menjadi elitis, dimana partai digunakan untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan dimana partai digunakan untuk melindungi dan memperjuangkan penguasanya, sehingga bersuara kepada sistem kekuasaan oligarki. Adapun pembalikan partai dan juga sistem partai populis menjadi elitis. Bertolak dari personafikasi dan sentralisasi kekuasaan partai itu, tidak dilandasi dengan kapabilitas kepemimpinan penguasa (elit) partai, sebagai akibat dari pengutamaan popularitas untuk memenangkan persaingan politik seperti pemilu.

Berkenaan dengan fungsi DPR sebagai pembuat kebijaksanaan publik, dominasi partai terhadap Parlemen memungkinkan transformasi partai dan sistem partai elitis menjadi kebijaksanaan

publik elitis. Gejala parpolisasi kebijaksanaan public produk DPR itu, bisa diamati dalam prioritas pilihan tipe dan fungsi kebijaksanaan publik. Terhadap empat tipe kebijaksanaan publik, yaitu ekstraktif (penggalan dan pemanfaatan sumber daya), regulatif (pengaturan), dan prosedur (pengkondisian tingkah laku), terlihat kecenderungan elitis karena memprioritaskan tipe ekstraktif dan regulatif ketimbang tipe distribusi dan prosedural, dan kecenderungan prioritas kebijaksanaan publik diantara memenuhi kepentingan elit (partai) dari pada memenuhi kepentingan rakyat (solusi masalah dan memajukan), pembuktiannya dapat ditampilkan dengan menelaah berbagai UU dan APBN.

Jelaslah bahwa perjalanan reformasi untuk demokrasi semakin diwarnai oleh oligarki partai politik, yang karena dominasinya atas DPR berakibat kepada penggeseran kinerja dan produk DPR untuk melayani rakyat, berubah menjadi melayani kepentingan partai sebagaimana diwakili oleh kepentingan elitnya.

Ada tiga (3) masalah utama yang mengkondisikan hubungan Partai dengan DPR seperti itu, yaitu inkapabilitas kepemimpinan kebanyakan Parlemen/DPR, lemahnya partai dan sistem partai sehingga gagal menciptakan kekuatan politik mayoritas sebagai basis kewibawaan dan kinerja pemerintah dan inkoherensi serta asinergisitas institusi demokrasi yang dijadikan komponen sistem pemerintahan.

Sekalipun dua pemilu demokratik terdahulu, yang merupakan hulu dari

ketiga masalah itu, karena dilandasi oleh makna demokrasi minimalis, namun UU politik yang dipersiapkan untuk memproses dan menindak lanjuti Pemilu tahun 2009 amatlah tidak memadai untuk memperbaiki partai dan sistem partai serta hubungan dengan DPR, karenanya lima tahun setelah Pemilu 2009 sepatasnya dimanfaatkan untuk merek ulang kepartaian dan parlemen melalui perubahan substansi UU Politik dan amandemen lanjut UUD. Sementara Pemilu 2014, praktek oligarki yang menempatkan pimpinan partai seolah-olah sebagai owner [pemilik] partai sudah seharusnya diakhiri, karena praktek seperti ini membuat kepemimpinan di tubuh partai akan terus direbut dan dipertahankan, sedangkan bagi yang mereka yang kalah dalam perebutan kekuasaan akan pindah ke partai lain seperti kutu loncat. Hal ini tidak menyehatkan untuk perkembangan demokrasi

Kepemimpinan partai politik (Parpol) di Indonesia memasuki taraf gejala politik oligarki. Kebanyakan pemimpin partai saat ini adalah orang yang memiliki dana besar, bukan seseorang dengan kemampuan organisator, mereka yang memimpin partai yang mampu membiayai partai, seperti Prabowo (Partai Gerindra), Surya Paloh (Partai Nasdem), Aburizal Bakrie (Partai Golkar) dan Hari Tanoesoedibjo (Partai Perindo). Mereka semua memimpin partai karena memiliki kekuatan untuk membiayai partai," kata pengamat sosial, Ignas Kleden.

Oligarki partai semakin meningkat tidak hanya disebabkan karena regulasi dalam UU Pemilihan Presiden telah

menafikan urgensi pelembagaan proses seleksi kandidat presiden oleh partai politik secara terbuka dan demokratis, melainkan juga tertutup akses dari partisipasi publik. Tidak mengherankan jika kemudian muncul fenomena yang mana sebagian besar posisi ketua umum atau pimpinan partai merupakan "tiket" untuk menjadi calon presiden, Padahal belum tentu ketua umum atau pimpinan partai tersebut memiliki kapasitas kepemimpinan sebagai presiden.

Oligarki partai juga karena finansial, lebih tepatnya pengumpulan finansial untuk pemilu berikutnya. Karena ongkos politik tersebut, partai-partai tersebut membangun koalisi lebih focus pada cara agar kelompok/partai mereka memperoleh sumber-sumber finansial. Penguatan pada sumber-sumber finansial, misalnya penguasaan jatah menteri untuk kelompok partai adalah hal yang paling penting dari utama, dibandingkan dengan kepentingan nasional.

Oligarki di Indonesia paling tepat digambarkan sebagai oligarki penguasa kolektif electoral (oligarki berkaitan dengan pemerintahan) atau dengan kata lain, menyertai transisi dari kediktatoran ke demokrasi adalah transisi lain yang sama-sama penting dari oligarki sultanistik dengan sekelompok orang amat sangat kaya dijinakan secara pribadi oleh Soeharto menuju oligarki penguasa kolektif electoral.

Pada pemilu 2019 politik balas budi ini bisa jadi salah satu cara ampuh Jokowi memuluskan kekuasaannya. Ben Bland, peneliti dari Lowy Institute, mengambil

contoh langkah Jokowi merangkul Prabowo. Baginya, upaya itu adalah pengkhianatan kepada demokrasi. Dengan diambilnya Prabowo, otomatis Partai Gerindra akan mendukung pemerintahan Jokowi; lantas siapa bisa menjadi oposisi yang “seharusnya ada dalam sistem demokrasi?”

Politik oligarki harus dihindari, karena bisa mengancam demokrasi Indonesia. Partai yang seharusnya mampu mengakomodir suara rakyat, bisa saja pada akhirnya hanya digunakan oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu.

### III. KESIMPULAN

Bahwa inti ataupun mengakarnya politik oligarki di Indonesia ada pada kekuatan materiil atau – kita sebut saja uang – karena dapat dimanifestasikan ke dalam bentuk kekuatan lain.

Menurut sejarahnya, uang adalah alat yang diciptakan manusia untuk mempermudah transaksi perdagangan, yang mana itu dapat menukar barang dan jasa. Akan tetapi, dalam perjalanannya, uang kemudian bertransformasi dengan meluaskan kapabilitasnya untuk menukar sesuatu.

karena kemampuannya untuk mewakili keinginan atau individu, uang kemudian menjadi suatu orientasi yang bahkan melampaui prinsip ataupun nilai-nilai normatif.

Artinya adalah, ini jawaban atas pertanyaan terkait mengapa banyak politisi ataupun partai politik menggadaikan idealismenya demi mendapatkan sponsor dana dari para oligark. Hal ini karena

idealisme tersebut mampu ditukarkan dengan uang atau telah mendapatkan harga tertentu.

Para politisi yang pada awalnya hanya mencari sokongan dana dari para oligark, kemudian menjadi terbelenggu karena dana tersebut tidak diberikan tanpa syarat tertentu.

Dengan demikian, pandangan politik tradisional yang menyebut politik adalah pertengkaran gagasan atau kekuatan pikiran, sepertinya telah tergantikan dengan pertengkaran kekuatan materil.

Pada akhirnya, mungkin dapat dipahami, kuatnya pengaruh politik oligarki di Indonesia adalah konsekuensi dari terjadinya politik berbiaya tinggi, yang mana para politisi yang ingin berlaga di Pemilu membutuhkan sokongan dana besar dari para oligark. Kemudian, kemampuan para oligark yang dapat mempengaruhi jalannya sistem politik ini berakar dari kapabilitas uang yang dapat menjadi alat tukar nilai-nilai personal.

### Daftar Pustaka

- [1] Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- [2] Budiardjo, Miriam, *Demokrasi Indonesia demokrasi parlemen dan demokrasi pancasila*, Jakarta, Gramedia, 1996.
- [3] Fukuoka, Yuki. 2013. “Oligarchy and Democracy in Post Suharto Indonesia” dalam jurnal *Political Studies Review*: 2013 Vol 11. Australia
- [4] Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media, 1999.
- [5] M.Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesi*, Yogyakarta, UII Press, 1993.

- [5] Miriam Budiadjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia, 1983.
- [6] Meriam Budiardjo, Demokrasi Indonesia demokrasi parlemen dan demokrasi pancasila, Jakarta, Gramedia, 1996.
- [7] Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market.
- [8] Suseno, Franz-Magnis. 2003. Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- [9] Winters, Jeffrey A. 2011.Oligarki. Jakarta: Gramedia.

#### **Sumber Lain**

- [10] <http://news.okezone.com/read/2011/06/17/39/469715/mahfud-sistem-politik-indonesia-oligarki>
- [11] <http://www.antaranews.com/berita/1267273859/indonesia-bisa-adopsi-pemberantasan-korupsi-di-china>
- [12] Firman Noor, Fenomena oligarki partai. Sindo, 28 Februari 2019
- [13] Michael dan Thomas B Pepinsky, "Melampaui Oligarki? Bahasan Kritis Kekuasaan, Prisma Resources Center, volume 1-27
- [14] Prisma. Vol. 33 No. 1 Tahun 2014 Robison, Richard and Vedi R Hadiz.

---

---